

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Almaududi, 2020, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun Akademik 2020/2021*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Limau Manis, Padang.
- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, ed. 1, cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, dan Muladi 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 3, P.T Alumni, Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan* Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakri, Muhammad, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi)*, JILID 1 Universitas Brawijaya Press, Malang.
- Bennett, Linda Rae and Sharyn Graham Davies, 2018, *Seksualitas, Kesehatan, Keragaman, dan representasi*, diterjemahkan oleh Irwan Martua Hidayana, Et. Al., cet. 1, ed. 1, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, ed. 1, cet. 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Danil, Elwi dan Nelwitis, 2015, *Hukum Penitensier*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Djamali, R. Abdoel, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. 2, cet. 17, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana* , ed. Revisi, cet. 4, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Hardy, Keiran, 2019, *Law In Australia Society An Introduction to Principles and Process*, [Hukum dalam Masyarakat Australia Sebuah Pengantar Prinsip dan Proses], Allen & Unwin, Crows Nest NSW 2065 Australia.

Hartono, Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad ke 20*, Penerbit Alumni, Bandung.

Husodo, Purwo, 2012, *Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika*, cet. 1, Familia (Group Relasi Inti Media), Yogyakarta.

Junaidi, Ahmad, 2012, *Porno!, Feminisme, seksualitas, dan Pornografi di Media*, PT. Grasindo, Jakarta.

Lamintang, P. A. F, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lanham, David Et. Al. 2006, *Criminal law in Australia, Introduction 1B. The Purposes of Criminal Law Supplement*, [Hukum Pidana di Australia, Pengantar 1B. Tujuan Dari Hukum Pidana Tambahan], The Federation Press, NSW Australia, 2006.

Maskun, 2013, *kejadian siber (cyber crime) suatu pengantar*, cet. 2, kencana, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, ct. 5, PT. Rineka Cipta, Jakarta
_____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ed. Revisi, cet. 8, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Moh. Nazir, 2017, dalam Risman F. Sikumbang, Ed, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta Bogor.

Mulyadi, Lilik, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, ed. 3, PT. Refika Aditama, Bandung.

Qamar, Nurul, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Makassar.

Redaksi Sinar Grafika, 2014, *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, cet. 10, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2016, *KUHAP dan KUHP*, cet. 15, Sinar Grafika, Jakarta.

Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar Kuhp*, ed. 1, cet. 2, Kencana, Jakarta.

Sambas, Nandang dan Mahmud, Ade, 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Siregar, H. Alimuddin, 2019, dalam M Syukri Azwar Lubis, Ed, *Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soeroso, R, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. 1, cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Rancangan Undang-Undang,

Konvensi Dan ketentuan Internasional lainnya.

1. Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Putusan PN Surabaya Nomor 2191/Pid.B/2014/pn.Sby, 2015, Tjandra Adi Gunawan

Als. Recca Hanabishi

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang Pornografi.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Penjelasan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

2. Australia New South Wales

a. Australia

Undang-Undang Commonwealth Konstitusi Australia, *Commonwealth of Australia Constitution Act*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Australia, *Criminal Code Act 1955 (Cth)*

b. New South Wales

Undang-Undang Kejahatan New South Wales, *Crime Act 1900 (NSW)*

Undang-Undang Perlindungan Anak Amandemen, *Child Protection (Offenders Registration) Amendment Act 2004 No. 85, Registration And Reporting Requirements For Certain Offenders Who Commit Sexual And Other Serious Offences Against Children*

Undang-Undang Pornografi Anak Amandemen (New South Wales), *Crime Amendment (Child Pornography) Bill 2004 (NSW)*.

New South Wales District Court, (pengadilan lebih tinggi atau tingkat menengah berada di daerah yurisdiksi negara bagian New South Wales), *Citation* (referensi ke preseden atau otoritas lain di pengadilan atau tulisan hukum) : *R v Jones [2009] NSWDC 8*

3. Internasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Australia.

Konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the rights of the child*) sejak Agustus 1990.

Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak (*Opsional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography*), pengesahan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012

Kongres PBB X, “*Background paper*” untuk “*Workshop on crimes related to the computer network*”, Dokumen A/CONF.187/10, 3-2-2000, hal. 5, Laporan Komisi II, ttg. Workshop, Dokumen A/CONF.187/L.10), 16-4-2000, hal. 1-2, dan Laporan Kongres X secara keseluruhan, *The term “computer-related*

crime” had been developed to encompass both the entirely new forms of crime that were directed at computers, networks and their users, and the more traditional form of crime that were now being committed with the use or assistance of computer equipment, Dokumen A/CONF.187/15, 19-72000, hal. 26

Council of Europe, European Committee on Crime Problems (CDPC) dan Committee of Experts on Crime in Cyber-Space (PC-CY), Draft Convention on Cyber Crime, No. 19 dan No. 25 Rev.5 th. 2000, Draft No. 27 Rev. th. 2001, Draft Explanatory Memorandum to the Draft Convention on Cybercrime” th. 2001

C. Jurnal

Ermanita Permatasari, 2015, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksplorasi Seksual Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana*”, As-Salam, Vol. IV, No.1, 2015.

I Nyoman Ngurah Suwarnatha, 2011, “*Konstitusional Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dan Partisipasi Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*”, Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar, Vol. II, No.1, November 2011.

D. Media Online

1. Laman Resmi Pemerintah

Badan Siber Dan Sandi Negara, “*Profil Tentang BSSN*”, <https://bssn.go.id>, dikunjungi pada tanggal 14 september 2021 Jam 15.52

2. Perpustakaan Online Universitas di Australia

Australian National University Library [Perpustakaan Universitas Nasional Australia], “The Australian legal System”, <https://libguides.anu.edu.au/c.php?g=634887&p=4547083>, dikunjungi pada tanggal 8 Agustus 2020 Jam 17.12.

State Library New South Wales [Perpustakaan Negara Bagian New South Wales], The Public Interest Advocacy Centre (PIAC), “*Hot Topics Australian Legal*

System”, <https://legalanswers.sl.nsw.gov.au/hot-topics-australian-legal-system/what-laws-deals>, dikunjungi pada tanggal 10 september 2020 Jam 09:03.

The University of Western Australia Library [Perpustakaan Negara Bagian Western Australia], “Legal Research Guide: Criminal Law What is Criminal Law”, https://guides.library.uwa.edu.au/criminal_law, dikunjungi pada tanggal 8 september Jam 16:54.

